

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu)

Fatchur Rohman¹, Yanto², Mohamad Novian Resa³

¹ Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59451, Indonesia

² Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59451, Indonesia

³ Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59451, Indonesia

Keywords:

Activity ratio; dependency ratio; efficiency ratio; financial performance; growth ratio; and independence ratio.

Kata Kunci:

Kinerja keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio ketergantungan, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the financial performance of the Jambu Village Government the object under study is the Budget Realization Report data. Jambu Village Income and Expenditure Budget 2016-2018. The method used in this study is a quantitative method using primary and secondary data. The data used in this study is the Jambu Village Budget Realization Report 2016-2018 after data is processed using financial ratios in the form of Independence Ratios, Efficiency Ratios, Dependency Ratios, Activity Ratios, and Growth Ratios.

Results from the 2016-2018 Jambu Village Financial Performance Analysis study showed that the Independence Ratio was very poor, the Efficiency Ratio was good or Efficient, the Dependency Ratio was very high to the Provincial or District Governments, the Activity Ratio was still unbalanced between the Ratio of Direct Shopping and Indirect Expenditure The Activity Ratio is Dominant Direct Spending, PADes rowth Ratio for 2016-2017 is very Low while 2017-2018 is very high, Growth Ratio of total PADes in 2016-2017 is very low and in 2017-2018 is relatively moderate, Direct Shopping Activity Ratio 2016 Ratio -2017 is very low, while 2017-2018 is very high while the Indirect Expenditure Activity Ratio for 2016-2017 is relatively moderate. Whereas 2017-2018 is very low.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Jambu, objek yang diteliti adalah data Laporan Realisasi Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambu tahun 2016-2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Desa Jambu tahun anggaran 2016-2018 setelah itu data diolah dengan menggunakan rasio keuangan berupa Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio ketergantungan, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil dari penelitian Analisis Kinerja Keuangan Desa Jambu 2016-2018 bahwa Rasio Kemandiriannya sangat kurang, Rasio Efisiennya sudah baik atau Efisien, Rasio Ketergantungannya sangat tinggi terhadap Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, Rasio Aktivitas masih belum berimbang antara Rasio Aktivitas Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung. Rasio Aktivitasnya lebih dominan Belanja Langsung, Rasio Pertumbuhan PADes tahun 2016-2017 sangat Rendah sedangkan tahun 2017-2018 sangat

tinggi, Rasio Petumbuhan total PADes tahun 2016-2017 sangat rendah dan tahun 2017-2018 relatif sedang, Rasio Pertumbuhan Rasio Aktivitas Belanja Langsung tahun 2016-2017 sangat rendah, sedangkan tahun 2017-2018 sangat tinggi sedangkan Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung tahun 2016-2017 relatif sedang. Sedangkan tahun 2017-2018 sangat rendah.

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang dasar nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dinilai dengan uang maupun barang dalam laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan. otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara mandiri tidak menggantungkan terhadap pemerintah Pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggung jawaban dalam penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan peraturan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan keuangan daerah. Data keuangan daerah memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran (Yuliati, 2016).

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan, sedangkan kinerja keuangan yaitu memberikan arahan tentang kinerja keuangan, memberikan penilaian ukuran kinerja terhadap manajemen pemerintah, memberikan masukan atau evaluasi atas pencapaian kinerja dan memperbaiki sistem terhadap kinerja pemerintahan (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran kinerja Pemerintah digunakan sebagai penilaian kinerja untuk menilai keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan kinerja yang telah di capai. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tolak ukur dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan pemerintah selama satu periode anggaran tertentu.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa aspek -aspek dalam pengukuran kinerja pemerintah antara Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan untuk menghasilkan keluaran, Kelompok proses (*process*) adalah ukuran dari kegiatan yang dilaksanakan dari segi, pelaksanaan kegiatan, ketepatan, kecepatan, maupun akurasi dalam melaksanakan aktivitas kegiatan tersebut, Kelompok keluaran (*output*) adalah suatu harapan langsung yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud dan tidak berwujud, Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran kegiatan dalam jangka menengah yang mempunyai efek langsung, Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang timbulkan baik positif maupun negatif.

Desa Jambu merupakan salah satu wilayah dari 8 desa yang berada di Kecamatan Mlonggo berada di wilayah pesisir laut Jawa dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Desa Jambu merupakan wilayah pesisir karena memiliki pantai dan berbatasan dengan Laut sehingga memiliki potensi ikan yang melimpah. Untuk mendukung potensi tersebut dibangunlah tempat pelelangan ikan. Selain itu Desa Jambu mempunyai industri mebel garden. Mebel garden yaitu mebel yang memproduksi berupa perabotan rumah tangga yang diletakan di halaman rumah seperti kursi dan meja taman. Potensi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian Desa. Jika pendapatan yang diperoleh dari industri mebel garden dan TPI maka pendapatan yang ada di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo akan juga akan meningkat begitupun sebaliknya.

Secara umum Perekonomian Desa Jambu ditopang oleh beberapa sektor mata pencaharian meliputi,

seperti petani, buruh, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang/wiraswasta, pensiunan, tukang bangunan, peternak, guru, nelayan dan lain-lain. (jambu.desa.id, 2019)

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Jambu tahun 2018 sektor pendapatan Desa di peroleh dari pendapatan Asli daerah, Dana Desa, Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan provinsi, Bantuan keuangan Kabupaten, lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Anggaran belanja Modal Desa digunakan untuk Belanja Pemerintah Desa, Belanja Tak Terduga, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangun Desa. Berikut Rician APBDes Desa Jambu:

Tabel 1. Pendapatan Asli Desa Jambu

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	288.300.000
2	Dana Desa	1.204.238.000
3	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	59.103.000
4	Alokasi Dana Desa	678.558.000
5	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	400.000.000
7	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	51.273
	Jumlah	2.685.250.273

Sumber: APBDes Jambu diolah, (2019)

Tabel 2. Belanja Desa Jambu

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Pemerintah Desa	900.032.473
2	Tak Terduga	18.200.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	45.035.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	489.455.800
5	Pembangunan Desa	1.157.664.000
	Jumlah	2.610.387.273

Sumber: APBDes Jambu diolah, (2019)

Dari data di atas menunjukkan bahwa total Anggaran pendapatan Asli Desa (APBDes) Jambu tahun 2018 sebesar Rp. 2,685,250,273 dimana pendapatan yang paling banyak menyumbang pendapatan Desa Jambu adalah Dana Desa yaitu sebesar Rp. 1,204,238,000 sedangkan yang paling sedikit yaitu Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah yaitu sebesar Rp. 51,273. Sedangkan untuk belanja modal sendiri pemerintah Desa Jambu Barat mengeluarkan Total Biaya sebesar Rp. 2,610,387,273. yang paling banyak biaya yang dikeluarkan adalah sektor infrastruktur pembangunan Desa yaitu sebesar Rp. 1,157,664,000 dan biaya pengeluaran paling sedikit yaitu biaya tak terduga sebesar Rp. 18,200,000.

Terdapat fenomena dalam Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Jambu yaitu karena masyarakat kurang diberi informasi dan wawasan mengenai bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Jambu selama periode 2016-2018.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun antara pendapatan dan belanja menunjukkan selisih surplus atau defisit bukanlah kunci utama dalam menentukan baiknya buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah karena kinerja keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu Penerimaan Daerah Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Biaya transfer (Dana Desa) dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, Sumber Daya Manusia, dan Kondisi Perekonomian Suatu Daerah.

Oleh sebab itu dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan beberapa mekanisme yaitu, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi adalah memberikan

informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Rohman & Relandani, 2019). Berkaitan dengan hal itu analisis terhadap kinerja keuangan memberikan informasi kepada pemerintah Desa Jambu dalam upaya mengambil keputusan maupun kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah berhasil dalam mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rasio keuangan merupakan salah satu cara untuk membuat perbandingan data laporan keuangan tahun lalu dengan tahun berjalan sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga pemerintahan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangannya. secara transparan, jujur, demokratis, efektif, Efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan karena untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Jambu dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode berjalan atau saat ini dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya mengalami perbaikan atau penurunan. Dalam menganalisis kinerja keuangan Desa Jambu yaitu dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan berupa analisis rasio Kemandirian, Rasio ketergantungan, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

Rasio kemandirian keuangan Desa adalah menunjukkan kemampuan pemerintah Desa dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, rasio dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Desa dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah Desa semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi, 2011). Sedangkan untuk menghitung rasio kemandirian menggunakan rumus $\frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Bantuan Pusat (Transfer)}} \times 100\%$ (Wahyuddin, 2017).

Rasio Efisiensi adalah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah Desa. rasio Efisiensi dikatakan baik apabila semakin kecil rasio Efisiensi maka kemampuan Desa semakin baik (Mahmudi, 2011). Sedangkan untuk menghitung rasio efisiensi menggunakan rumus $\frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$ (Wahyuddin, 2017).

Rasio ketergantungan Desa dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan Transfer yang diterima oleh pemerintah Desa dari pemerintah pusat dengan total penerimaan Desa semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah Desa terhadap pemerintah daerah. Meskipun pemerintah pusat (Mahmudi, 2011). Sedangkan untuk menghitung rasio ketergantungan menggunakan rumus $= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$ (Nurhayati, 2015).

Rasio Aktivitas yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja Rutin (Tidak Langsung) dan Belanja Modal (Langsung) secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja Rutin berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil begitu juga sebaliknya semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin besar (Halim, 2012). Sedangkan untuk menghitung rasio Aktivitas menggunakan rumus $\frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$ dan $\frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$ (Lazyra, 2016).

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya, dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dan digunakan sebagai bahan evaluasi potensi mana perlu diperhatikan (Halim, 2012).

Hasil rasio keuangan yang telah dianalisis digunakan sebagai media pengukuran dalam kemandirian

keuangan daerah pemerintah Desa Jambu dalam membiayai otonomi daerah, mengukur Kinerja Keuangan dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan yang di peroleh dari pendapatan dan pengeluaran selama periode jangka waktu tertentu.

Faktor dalam mengukur tingkat kemampuan kinerja keuangan daerah dalam melaksanakan otonominya adalah kemampuan kinerja keuangan dalam menentukan bentuk dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Salah satu untuk mengetahui kinerja keuangan adalah kemampuan pemerintah dalam mengatur rumah tangganya atau roda pemerintahannya sendiri dalam mengelola keuangannya dalam menjalankan roda pemerintahannya (Sunyoto, 2004).

Berbagai penelitian kinerja keuangan daerah menurut beberapa peneliti antara lain penelitian yang berjudul Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo belum maksimal, walaupun dalam pengelolaan dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan Efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat maupun provinsi dibandingkan dengan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal (Rahmayati, 2016).

Sesuai penelitian yang dilakukan (Sijabat et al., 2014) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR18,01%. Kinerja keuangan Kota Malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecendrungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat, Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan Kota Malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

Dalam Penelitiannya (Pramono, 2014) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011). Sedangkan Menurut (Rochmah, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan menurut menurut (Machmud et al., 2014) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan daerah Sulawesi Utara yang belum setabil atau belum baik, dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif pendekatan deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan fenomena atau yang ada dengan menggunakan angka-angka mengenai fakta atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Jambu Barat dengan Analisis Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran APBDes Jambu

tahun Anggaran 2016-2018 yang disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek atau lokasi penelitian berupa keterangan dan penjelasan dari pemerintah Desa Jambu. Data Sekunder berasal dari survey lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data. Sumber data berasal dari pemerintah Desa Jambu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa periode 2016-2018.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan yang bersumber dari dokumen dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambu periode 2016-2018. Wawancara, memberikan sesi tanya jawab kepada pegawai yang berhubungan dengan hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa periode 2016-2018 yaitu: kepala Desa, dan Carik. Observasi, melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung di Desa Jambu untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Analisis Rasio Laporan Keuangan sebagai berikut: Rasio kemandirian adalah menunjukkan kemampuan pemerintah Desa dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, rasio dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Desa dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi, 2011). Tingkat kemandirian diukur berdasarkan nilai rasio sebesar 0% - 25% dikategorikan rendah sekali, artinya pola hubungan tingkat kemandirian Instruktif; rasio sebesar 25% - 50% dikategorikan rendah, artinya pola hubungan tingkat kemandirian Konsultasi; rasio sebesar 50% - 75% dikategorikan sedang, artinya pola hubungan tingkat kemandirian Partisipatif; rasio sebesar 75% - 100% dikategorikan tinggi, artinya pola hubungan tingkat kemandirian Delegatif. (Mahsun, 2006)

Rasio efisiensi PADes adalah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah Desa. Rasio efisiensi dikatakan baik apabila semakin kecil rasio efisiensi maka kemampuan daerah semakin baik (Mahmudi, 2011). Tingkat efisiensi diukur berdasarkan nilai rasio > 100% termasuk kriteria tidak efisien; rasio = 100% termasuk kriteria efisien berimbang; rasio < 100% termasuk kriteria efisien. (Mahmudi, 2011)

Rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah Desa dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat dengan total penerimaan Desa. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Mahmudi, 2011). Tingkat ketergantungan diukur berdasarkan nilai rasio 0% - 10% termasuk kriteria sangat rendah; rasio >10% - 20% termasuk kriteria rendah; rasio >20% - 30% termasuk kriteria sedang; rasio >30% - 40% termasuk kriteria cukup; rasio >40% - 50% termasuk kriteria tinggi; dan rasio >50% termasuk kriteria sangat tinggi. (Tim Litbang Depdagri RI Fispol, 1991)

Rasio aktivitas yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja Rutin (Tidak Langsung) dan Belanja Modal (Langsung) secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja Rutin berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil begitu juga sebaliknya semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin besar (Halim, 2012). Tingkat aktivitas diukur berdasarkan nilai rasio 0% - 10% termasuk kategori sangat kurang; rasio >10% - 20% termasuk kategori kurang; rasio >20% - 30% termasuk kategori sedang; rasio >30% - 40% termasuk kategori cukup; rasio >40% - 50% termasuk kategori tinggi; dan rasio >50% termasuk kategori sangat tinggi. (Wulandari, 2001)

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, digunakan sebagai bahan evaluasi potensi mana yang perlu diperhatikan. Tingkat pertumbuhan PAD diukur berdasarkan nilai rasio 0% - 25% termasuk kriteria rendah; rasio 25% -

50% termasuk kriteria sedang; dan rasio 50% - 100% termasuk kriteria tinggi. (Sholeh, 2016)

HASIL

Rasio kemandirian keuangan Desa adalah menunjukkan kemampuan pemerintah Desa dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, rasio dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Desa dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah Desa semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi, 2011). Hasil perhitungan rasio kemandirian Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Rasio Kemandirian Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	15,09%
2	2017	16,91%
3	2018	21,11%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Rasio Efisiensi (PADes) adalah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima , kinerja pemerintah. Rasio Efisiensi dikatakan baik apabila semakin kecil rasio Efisiensi maka kemampuan Desa semakin baik (Mahmudi, 2011). Hasil perhitungan rasio Efisiensi Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	99,38%
2	2017	97,54%
3	2018	95,90%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Rasio Ketergantungan Desa dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah Desa dari pemerintah Daerah maupun pusat dengan total penerimaan Desa. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah Desa kepada pemerintah Daerah maupun Pusat (Mahmudi, 2011). Hasil perhitungan rasio ketergantungan Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Daerah Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	86,88%
2	2017	80,16%
3	2018	90,44%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Rasio Aktivitas yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (tidak langsung) dan belanja modal (langsung) secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil begitu juga sebaliknya semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin besar (Halim, 2012). Hasil perhitungan rasio Aktivitas Desa Jambu berdasarkan belanja langsung ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Rasio Aktivitas Desa Jambu Berdasarkan Belanja Langsung

No.	Tahun	Rasio
1	2016	50,71%
2	2017	67,33%
3	2018	73,01%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019.

Hasil perhitungan rasio Aktivitas Desa Jambu berdasarkan belanja tidak langsung ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Rasio Aktivitas Desa Jambu Berdasarkan Belanja Tidak Langsung

No.	Tahun	Rasio
1	2016	20,91%
2	2017	33,32%
3	2018	26,86%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi potensi mana yang perlu diperhatikan (Halim, 2012). Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	0%
2	2017	-2,02%
3	2018	95,43%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019.

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Asli Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	0%
2	2017	-5,24%
3	2018	38,76%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	0%
2	2017	18,59%
3	2018	54,58%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Desa Jambu ditunjukkan pada tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Desa Jambu

No.	Tahun	Rasio
1	2016	0%
2	2017	41,82%
3	2018	14,90%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, rasio dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi, 2011)

Tabel 12. Rasio Kemandirian Desa Jambu

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Bantuan Pusat / Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan
2016	331,108,000	2,193,634,000	15,09%	Rendah
2017	324,400,285	1,917,852,000	16,91%	Rendah
2018	634,000,000	3,002,533,000	21,11%	Rendah
Rata-rata			17,70%	

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio kemandirian Desa Jambu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 15,09% pada tahun 2017 sebesar 16,91%, dan pada tahun 2018 sebesar 21,11% karena PADes dan Bantuan Transfer mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2018. Rata-rata Rasio Kemandirian Desa Jambu sebesar 17,70% sedangkan pendapatan transfer atau bantuan dari pusat maupun provinsi pada tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan Bantuan Provinsi dan kabupaten mengalami penurunan karena itu pada tahun 2017 mengalami penurunan dalam pendapatan transfer. Selain itu Dana Bantuan atau Transfer lebih tinggi di bandingkan pendapatan Asli Desa hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Desa Jambu sangat kurang dan bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota masih sangat tinggi pada tahun 2016 Bantuan Pusat (transfer) sebesar 84,91%, pada tahun 2017 sebesar 83,09%, dan tahun 2018 sebesar 78,89% rata-rata tingkat bantuan pusat atau transfer Desa Jambu tahun 2016-2018 sebesar 82,29% . Jadi hasil Rasio Kemandirian Desa Jambu Rendah Sekali karena dibawah 25%. Pendapatan Asli Desa Jambu yang mengalami peningkatan pada Bengkulu Petinggi dan perangkat Desa pada tahun 2016 dan 2018 yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi karena hasil Bengkulu Desa mengalami peningkatan penjualan berupa padi/beras, sayuran, singkong dll. sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena adanya kekosongan dalam jabatan perangkat Desa (Carik) dan juga berkurangnya hasil Bengkulu Desa. pada tahun 2016 Bengkulu Petinggi dan Perangkat Desa sebesar Rp. 135,796,250 dan tahun 2018 naik sebesar Rp.317,000,000 sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 131,644,285. Bengkulu Desa terdiri dari sawah milik desa yang terdiri dari padi, singkong, sayuran, dan lain-lain. Sedangkan, bantuan pusat atau transfer yang mengalami peningkatan pada Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun 2016 mengalami peningkatan Rp. 205,000,000 , tahun 2017 mengalami penurunan Rp. 35,000,000, dan tahun 2018 mengalami peningkatan Rp. 305,000,000.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Desa Jambu Masih sangat rendah dimana peranan pemerintah pusat (ekstern) lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Desa Jambu. Seharusnya pemerintah Daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat dengan cara menambah pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan setiap sumber pendapatan yang potensial guna menambah PAD nya supaya pemerintah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya atau meningkatkan pendapatannya.

Tabel 13. Rasio Efisiensi Desa Jambu

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi	Kriteria kemampuan
2016	2,509,339,080	2,524,742,000	99,38%	Efisien
2017	2,333,422,605	2,392,252,285	97,54%	Efisien
2018	3,183,684,273	3,319,584,273	95,90%	Efisien
Rata-rata			97,60%	

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Rasio Efisiensi Desa Jambu selalu mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 99,38%, tahun 2017 sebesar 97,54%, dan tahun 2018 sebesar 95,90% rata-rata rasio Efisiensi tahun 2016-2018 sebesar 97,60% jadi hasil Rasio Efisiensi Desa Jambu termasuk dalam kriteria "Efisien", karena di bawah 100%. Realisasi Belanja Desa Jambu yang mengalami kenaikan pada Bidang pembangunan Desa yaitu pada tahun 2016 dan 2018. Kenaikan tersebut terjadi karena penerimaan Desa meningkat. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,323,091,000, dan 2018 sebesar Rp. 1,759,336,500 sedangkan yang mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,030,181,952. Karena adanya penurunan dalam pendapatan Desa antara lain hasil Bengkulu, pendapatan transfer dari provinsi mengalami penurunan oleh sebab itu pemerintah Desa Jambu harus mengurangi biaya pengeluaran (Belanja) Desa.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Desa yang meningkat Bengkulu Petinggi dan perangkat Desa dan Bantuan keuangan Kabupaten pada tahun 2016 dan 2018 yang mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan ini akibat adanya kekosongan dalam perangkat Desa (Carik) dan juga berkurangnya pendapatan transfer Desa. pada tahun 2016 Bengkulu Petinggi dan Perangkat Desa sebesar Rp. 135,796,250 dan tahun 2018 naik sebesar Rp. 317,000,000 sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 131,644,285. Sedangkan bantuan pusat atau transfer mengalami peningkatan pada sektor Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 205,000,000 tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 35,000,000, dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 305,000,000. secara umum Rasio Efisiensi Desa Jambu menunjukkan angka kurang dari 100% Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Desa (PADes) pemerintah Desa Jambu sudah efisien. Setiap pemerintah daerah seharusnya menghemat anggaran dalam melakukan pengeluaran biaya untuk membeli barang-barang yang penting atau benar-benar butuh dalam mengelola pemerintahannya dan tidak selalu boros dalam membelanjakan barang-barang yang tidak begitu penting.

Tabel 14. Rasio Ketergantungan Desa Jambu

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Desa	Rasio Ketergantungan	Kriteria Kemampuan
2016	2,193,634,000	2,524,742,000	86,88%	Sangat Tinggi
2017	1,917,852,000	2,392,252,285	80,16%	Sangat Tinggi
2018	3,002,533,000	3,319,584,273	90,44%	Sangat Tinggi
Rata-rata			85,82%	

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio ketergantungan Desa Jambu mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 86,88%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 80,16% dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 90,44% dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rasio ketergantungan pemerintah Desa Jambu pada periode 2016-2018 memiliki ketergantungan sangat Tinggi. Rata-rata rasio ketergantungan Desa Jambu tahun 2016-2018 sebesar 85,82%, sedangkan bantuan pusat atau transfer mengalami peningkatan pada sektor Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 205,000,000 tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 35,000,000, dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 305,000,000.

Sedangkan Total Pendapatan Desa yang meningkat pada bengkok petinggi dan perangkat Desa dan Bantuan keuangan Kabupaten pada tahun 2016 dan 2018 yang mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan karena hasil bengkok mengalami penurunan dan juga adanya kekosongan dalam perangkat Desa (Carik). pada tahun 2016 Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa sebesar Rp. 135,796,250 dan tahun 2018 naik sebesar Rp.317,000,000 sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 131,644,285. Sedangkan bantuan pusat atau transfer mengalami peningkatan pada sektor Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 205,000,000 tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 35,000,000, dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 305,000,000.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Rasio ketergantungan pemerintah Desa Jambu pada periode 2016-2018 memiliki ketergantungan sangat Tinggi karena diatas 50%..dalam mengatasi tingkat ketergantungan Daerah terhadap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan PADesnya dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PADes, sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota bisa semakin berkurang.

Tabel 15. Rasio Aktivitas Belanja Langsung Desa Jambu

Tahun	Belanja Langsung	Total Realisasi Belanja Desa	Rasio Aktivitas Belanja Langsung	Kriteria Kemampuan
2016	1,272,726,500	2,509,339,080	50,71%	Sangat Baik
2017	1,503,806,601	2,233,422,605	67,33%	Sangat Baik
2018	2,324,594,300	3,183,684,273	73,01%	Sangat Baik
Rata-rata			60,35%	

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Tabel 16. Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung Desa Jambu

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Total Realisasi Belanja Desa	Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung	Kriteria Kemampuan
2016	524,757,770	2,509,339,080	20,91%	Cukup
2017	744,216,000	2,233,422,605	33,32%	Sedang
2018	855,139,237	3,183,684,273	26,86%	Cukup
Rata-rata			27,03%	

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Aktivitas Desa Jambu sebagian besar dana yang dimiliki digunakan untuk belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 50,71%, 2017 sebesar 67,33% sedangkan tahun 2018 sebesar 73,01% rata-rata Rasio Aktivitas belanja Langsung tahun 2016-2018 sebesar 60,35%.

Sedangkan belanja Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan yaitu pada belanja Jambu pada Tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan pada Belanja Pembinaan Linmas karena adanya tambahan atau personil dalam pembinaan Linmas karena itu biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan terus meningkat tahun 2016 sebesar Rp. 12,200,000, tahun 2017 sebesar Rp. 15,680,000, dan 2018 sebesar Rp. 37,000,000

Sedangkan belanja Tidak Langsung tahun 2016-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 33,32%, pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 20,91%, pada tahun 2018 sebesar 26,86%. rata-rata Belanja Tidak Langsung tahun 2016-2018 sebesar 27,03%.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 yang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut karena adanya musyawarah antara petinggi Desa dan Perangkat Desa yang menyetujui anggaran untuk tunjang petinggi dan perangkat Desa di naikan yaitu pada Belanja Tunjangan Petinggi dan perangkat tahun 2016 sebesar Rp. 142,743,750, tahun 2017 sebesar Rp. 172,800,000, dan tahun 2018 sebesar Rp. 234,000,000 Sedangkan hasil dari Rasio aktivitas Desa Jambu selama periode 2016-2018 Belanja Langsung Sangat Baik di atas 50%. Sedangkan Belanja Tidak Langsung Cukup Baik karena dibawah 40%.

Pemerintah daerah seharusnya bisa lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya yakni membagi rata antara belanja operasional dengan belanja modal pada setiap program yang dilaksanakan.

Tabel 17. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Jambu

Tahun	PADes	Total Pendapatan PADes	Rasio Pertumbuhan PADes	Rasio Total PADes
2016	-	-	-	-
2017	-6,707,715	-132,489,715	-2,02%	-5,24%
2018	309,599,715	794,842,273	95,43%	38,76%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PADes Desa Jambu tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar -2,02% dan tahun 2017-2018 PADes nya mengalami peningkatan sebesar 95,43%. Kenaikan Pertumbuhan PADes Desa Jambu tahun 2016-2018 sebesar 93,41% Jadi hasil PADes Desa Jambu tahun 2016-2017 sangat rendah karena dibawah 25% dan tahun 2017-2018 hasilnya tinggi diatas 50%, sedangkan Total PADes Desa Jambu tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 5,24% dan 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 38,76%. Kenaikan pertumbuhan Total PADes Desa Jambu tahun 2016-2018 sebesar 33,52%. Jadi hasil Pertumbuhan Total PADes tahun 2017-2018 di bawah 25% dan tahun 2017-2018 di bawah 50%.

PADes Desa Jambu tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan pada sektor Hasil Aset Desa dan Bngkok perangkat Desa pada tahun 2016 dan 2018 yang mengalami peningkatan sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan. 2016 sebesar Rp. 182,326,250 dan 2018 sebesar Rp. 234,000,000 sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 131,644,285. Hasil Usaha dan Bngkok Desa Mengalami peningkatan tahun 2016 dan 2018 karena meningkatnya penjualan dibidang pertanian meliputi padi/beras, sayuran (wortel, kangkung, dll.), singkong, sedangkan Total PADes Desa Jambu tahun 2016-2018 mengalami peningkatan pada sektor Hasil Usaha dan Pendapatan Transfer pada Dana Desa. Hasil usaha Desa Jambu tahun 2016 sebesar Rp. 142,743,750, tahun 2017 sebesar Rp. 172,800,000, dan 2018 sebesar Rp. 317,000,000. Hasil Usaha meliputi pertanian meliputi hasil pertanian dan BUMDES sektor pertanian meliputi padi/beras, sayuran (wortel, kangkung, dll.), singkong. dan BUMDES di bidang usaha simpan pinjam. Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan PADes nya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PADes nya.

Tabel 18. Rasio Pertumbuhan Belanja Desa Jambu

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Rasio Belanja Langsung	Rasio Belanja Tidak Langsung
2016	-	-	-	-
2017	231,080,101	219,458,230	18,59%	41,82%
2018	820,787,699	110,923,216	54,58%	14,90%

Sumber: APBDes Jambu diolah, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan Rasio Pertumbuhan Belanja Desa Jambu dimana Belanja Langsung pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 18,59% dan 2017-2018 mengalami Peningkatan sebesar 54,58%. Kenaikan Pertumbuhan Belanja Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 sebesar 35,99% jadi hasil Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 sangat rendah dibawah 25% sedangkan tahun 2017-2018 sangat tinggi di atas 50%.

Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Desa Jambu pada Tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan pada Belanja Pembinaan Linmas karena adanya tambahan atau personil dalam pembinaan Linmas karena itu biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan terus meningkat tahun 2016 sebesar Rp. 12,200,000, tahun 2017 sebesar Rp. 15,680,000, dan 2018 sebesar Rp. 37,000,000, sedangkan Belanja Tidak Langsung Desa Jambu pada tahun 2016-2017 sebesar 41,82% dan pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 14,90%. Penurunan Desa Jambu tahun 2016-2018 sebesar 26,92%. jadi hasil dari Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Desa Jambu tahun 2016-2017 relatif Sedang dibawah 50% dan tahun 2017-2018 hasilnya sangat rendah di bawah 25%.

Belanja Tidak Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 yang mengalami penurunan Pada Sektor kegiatan

pendidikan Paud. Karena pendidikan Paud Desa Jambu tidak bisa memberikan surat keterangan (SK) dan juga tidak mempunyai surat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). tahun 2016 sebesar Rp. 14,250,000, tahun 2017 sebesar Rp. 4,500,000, dan 2018 sebesar Rp, 3,750,000. Sebaiknya pemerintah Desa dalam pertumbuhan belanja harus seimbang dalam mengalokasikan dana belanjanya antara belanja langsung dan tidak langsung .

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka diambil kesimpulan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Desa Jambu Periode 2016-2018 adalah masih belum optimal karena peranan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintahan daerah sendiri dengan Rasio kemandirian dibawah 25% dimana tahun 2016 sebesar 15,99% tahun 2017 sebesar 16,91% dan tahun 2018 sebesar 21,11%.

Pemerintah Desa Jambu Efisien efisien dalam mengelola pendapatan dan Belanja Desa hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efisien Efisiensi sebesar 99,38% tahun 2016, 97,54% tahun 2017, dan 95,90% tahun 2018 karena suatu daerah dikatakan efisien bila hasil Rasio Efisien efisiensi kurang dari 100%.

Rasio ketergantungan keuangan Desa Jambu tahun 2016-2018 dengan tinggi dengan rasio mencapai lebih dari 50% dimana hasil Rasio ketergantungan tahun 2016 sebesar 86,88%, tahun 2017 sebesar 80,16%, dan tahun 2018 sebesar 90,44%.

Pemerintah Desa Jambu dalam menggunakan dananya belum berimbang sebagian besar dana Pendapatan Desa digunakan untuk Belanja Langsung, Belanja Langsung sebesar 50,71% tahun 2016, 67,33% tahun 2017, dan 73,01% tahun 2018 sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar 20,91% tahun 2016, 33,32% tahun 2017, dan 26,86% tahun 2018.

Jumlah Pendapatan Asli Desa mengalami pertumbuhan yang positif dari yang paling rendah -2,02% pada 2016- 2017 sedangkan 2017-2018 naik 95,43% sedangkan total PADes nya mengalami penurunan dari yang paling rendah tahun 2017-2018 -5,24%, sedangkan tahun 2017-2018 naik 38,76% hasil pertumbuhan PADes tahun 2016-2017 rendah kurang dari 25% dan 2017-2018 tinggi di atas 50% dan Total PADes- nya tahun 2016-2017 rendah kurang dari 25% dan tahun 2017-2018 di bawah 50%.

Rasio pertumbuhan belanja, belanja langsung mengalami peningkatan dan tidak langsung mengalami penurunan. Rasio Pertumbuhan belanja langsung tahun 2016-2017 sebesar 18,59% dan 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 54,58% dan belanja tidak langsung mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 sebesar 41,82% dan tahun 2017-2018 Mengalami penurunan sebesar 14,90%. Jadi hasil Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 tinggi di atas 50%, sedangkan Belanja Tidak Langsung Desa Jambu tahun 2016-2018 hasilnya kurang dari 50%.

UCAPAN TERIMA KASIH

The researcher would like to thank the Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) of the Jepara Institute for Research and Community Service (LPPM) for providing support and contribution to this research. And the Faculty of Economics and Business of the Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara for granting permission for researchers to conduct research from the faculty of economics and business. Unisnu students, especially the Economics and Business Faculty accounting program and all those who have agreed to become the object of this research. Thank you for working together during the research.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. *Skripsi Program Studi Akuntansi*, 1-63.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1-13.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Nurhayati, N. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Cano Ekonomos*, 4(1), 55-66.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83-112.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *EKA CIDA*, 1(1), 40-54.
<https://journal.amikomsolo.ac.id/index.php/ekacida/article/viewFile/9/12>
- Rochmah, S. N. (2015). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)*.
- Rohman, F., & Relandani, A. (2019). *Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Ngasem Kecamatan Batealit)*. 16(1).
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Administrasi Publik (JAP)*, 2(32), 236-242.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>
- Sunyoto, U. (2004). *In Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Wahyuddin, N. S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5, 51-60.